EVALUASI KEBIJAKAN POLITIK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

Lidwina Tutur Rimpuan Malau
NPP. 33.0392
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: lidwinamalau15@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ani Martini, S.STP., M.Si
Email: animartini@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This study was motivated by a research gap regarding the evaluation of environmental protection and management policies at the regency level, particularly in Karawang Regency, West Java Province, which remains relatively underexplored from a public policy evaluation perspective. In addition, there is an evidence gap indicating that previous studies have produced varying findings regarding the effectiveness of environmental policies, while Karawang Regency, as one of the largest industrial areas in Indonesia, continues to face environmental issues such as pollution and land-use conversion.* ***Purpose:*** *Therefore, this study aims to evaluate the environmental protection and management policy in Karawang Regency, West Java Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The informants consisted of representatives from the Environmental Agency, Regional House of Representatives (DPRD), Public Works and Spatial Planning Agency, community members, and farmers selected through purposive sampling. Data were analyzed using William N. Dunn's policy evaluation framework, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.* ***Results/Findings:*** *The findings reveal that the environmental protection and management policy in Karawang Regency has not been implemented optimally. Although the local government has established regulations and various environmental management programs, their implementation still faces several challenges, as reflected in the suboptimal achievement of the indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness.* ***Conclusion:*** *It can therefore be concluded that the environmental protection and management policy in Karawang Regency has not yet achieved its intended objectives optimally. Strengthening policy implementation is necessary to support sustainable and environmentally sound development.*

Keywords: *Environmental Management, Environmental Protection, Karawang Regency, Policy Evaluation, Public Policy.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat yang masih relatif terbatas dikaji

dalam perspektif evaluasi kebijakan publik. Selain itu, terdapat kesenjangan bukti (*evidence gap*) yang menunjukkan bahwa berbagai penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang berbeda mengenai efektivitas kebijakan lingkungan hidup, sementara Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan dan alih fungsi lahan. **Tujuan:** Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas unsur Dinas Lingkungan Hidup, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masyarakat, serta petani yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi dan berbagai program pengelolaan lingkungan hidup, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang tercermin pada belum optimalnya pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. **Kesimpulan:** Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal sehingga masih diperlukan penguatan implementasi kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Kabupaten Karawang, Kebijakan Publik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perlindungan Lingkungan Hidup,

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu agenda strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian sumber daya alam. Dalam perspektif kebijakan publik, pengelolaan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis administratif, melainkan juga sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kepentingan ekonomi, serta kelembagaan pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan daerah (Bangsawan, 2025). Oleh karena itu, kualitas kebijakan lingkungan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Sulistyawati & Nugroho, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, isu tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi perhatian global akibat meningkatnya tekanan pembangunan terhadap daya dukung lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi, ekspansi investasi, dan perubahan tata guna lahan sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang efektif (Noor et al., 2025; Siraj, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan (Syarifuddin et al., 2025).

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut. Sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia sekaligus wilayah penyangga ketahanan

pangan nasional, Kabupaten Karawang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Pertumbuhan kawasan industri dan meningkatnya aktivitas investasi telah mendorong perubahan struktur pemanfaatan ruang, termasuk terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan permukiman. Di sisi lain, peningkatan aktivitas industri juga berimplikasi terhadap munculnya berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, serta meningkatnya kasus pelanggaran lingkungan hidup yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah (Noor et al., 2025).

Berbagai studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta dominasi kepentingan ekonomi sering menjadi faktor yang menyebabkan kebijakan lingkungan belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan (Pambudi & Kusumanto, 2023; Pambudi, 2024; Siraj, 2025). Penelitian mengenai tata kelola sumber daya alam di Indonesia juga menemukan bahwa implementasi kebijakan lingkungan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan daerah (Noor et al., 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan kapasitas kelembagaan yang mendukungnya (Pambudi, 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Sulistyawati dan Nugroho (2024) menunjukkan bahwa kualitas institusi dan partisipasi publik merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa evaluasi kebijakan lingkungan perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat mengidentifikasi berbagai kelemahan maupun peluang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui pembentukan regulasi daerah yang mengatur pengendalian pencemaran, pemanfaatan ruang, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun demikian, berbagai fenomena empiris menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Meningkatnya kasus pelanggaran lingkungan, berkurangnya luas lahan pertanian produktif, serta tingginya tekanan industrialisasi menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Situasi ini sejalan dengan temuan Bangsawan (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas tata kelola sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, atau implementasi kebijakan lingkungan pada level nasional maupun sektoral (Siraj, 2025; Noor et al., 2025). Penelitian yang secara khusus mengevaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn masih relatif terbatas. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan bukti (*evidence gap*) terkait bagaimana dinamika politik daerah, kepentingan investasi, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan di daerah industri seperti Kabupaten Karawang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kebijakan lingkungan yang telah diterapkan, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik pada sektor lingkungan hidup di daerah yang menghadapi tekanan industrialisasi tinggi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah banyak dilakukan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek tata kelola sumber daya alam, implementasi kebijakan lingkungan, serta hubungan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola sumber daya alam berkontribusi terhadap meningkatnya konflik lingkungan, rendahnya akuntabilitas kebijakan, serta munculnya ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam (Aysan et al., 2023). Selain itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan orientasi pembangunan ekonomi yang dalam banyak kasus lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan keberlanjutan lingkungan (Trihatmoko, 2024). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti tata kelola sumber daya alam pada level nasional dan belum secara khusus mengevaluasi bagaimana kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijalankan pada tingkat pemerintah daerah, khususnya daerah dengan tekanan industrialisasi yang tinggi.

Penelitian lain menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia masih dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan kebijakan lingkungan (Hidayat, 2024). Temuan serupa juga menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, kualitas kelembagaan, serta kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan (Ines et al., 2025). Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih berorientasi pada identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dan belum mengevaluasi secara komprehensif keberhasilan kebijakan lingkungan berdasarkan indikator evaluasi kebijakan publik yang terukur.

Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil mengenai efektivitas kebijakan lingkungan hidup. (Karso, 2025) menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga sering mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, penelitian lain menunjukkan bahwa penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan pengawasan, serta koordinasi kelembagaan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola lingkungan hidup. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan bukti (*evidence gap*) mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada daerah yang menghadapi tekanan pembangunan dan industrialisasi yang tinggi.

Dalam konteks pemerintahan daerah, kajian mengenai kebijakan lingkungan hidup masih didominasi oleh penelitian yang berfokus pada implementasi program, pengelolaan sumber daya alam secara sektoral, maupun aspek keberlanjutan pembangunan. (Pambudi & Kusumanto, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, sedangkan (Bangsawan, 2025) menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik bagaimana dinamika politik daerah, kepentingan industrialisasi, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi keberhasilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, terdapat kesenjangan konteks (*context gap*) karena penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada level nasional atau membahas tata kelola sumber daya alam secara umum, sedangkan evaluasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten masih relatif terbatas. Kedua, terdapat kesenjangan konseptual (*conceptual gap*) karena sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan dan tata kelola lingkungan, namun belum banyak yang menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan secara terpadu. Ketiga, terdapat kesenjangan empiris (*empirical gap*) terkait masih terbatasnya penelitian

yang mengkaji keterkaitan antara dinamika politik daerah, kepentingan industrialisasi, dan efektivitas kebijakan lingkungan hidup pada daerah industri.

Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan penelitian tersebut melalui evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia dengan menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan dari aspek implementasi, tetapi juga menganalisis bagaimana dinamika politik daerah, tekanan industrialisasi, dan kapasitas kelembagaan memengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi semakin penting dilakukan di tengah meningkatnya tekanan pembangunan, industrialisasi, dan kebutuhan investasi daerah yang sering kali berimplikasi terhadap kualitas lingkungan hidup. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kebijakan yang efektif dan berkelanjutan (Bangsawan, 2025). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tanpa evaluasi yang komprehensif, kebijakan lingkungan hidup berpotensi tidak mampu menjawab berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis.

Secara keilmuan, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperkaya kajian kebijakan publik, khususnya dalam bidang evaluasi kebijakan lingkungan hidup pada tingkat pemerintahan daerah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola lingkungan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, efektivitas implementasi kebijakan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam membangun koordinasi antarpemangku kepentingan (Pambudi & Kusumanto, 2023). Selain itu, penguatan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan (Akbar, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya pada sektor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari sisi empiris, urgensi penelitian ini terletak pada kondisi Kabupaten Karawang yang menghadapi tekanan industrialisasi yang tinggi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Perkembangan industri yang pesat telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan berupa alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dan meningkatnya potensi konflik pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat industrialisasi yang tinggi cenderung menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan apabila kebijakan yang diterapkan tidak didukung oleh pengawasan dan tata kelola yang efektif (Aysan et al., 2023; Karso, 2025). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.

Secara praktis, penelitian ini memiliki urgensi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan hidup. Tanpa adanya evaluasi yang berbasis data dan kondisi empiris daerah, kebijakan yang diambil berpotensi kurang efektif dalam mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas pembangunan dan industri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga urgensi praktis dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Karawang.

1.4 Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu memiliki persamaan dalam menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan,

kapasitas kelembagaan, efektivitas pengawasan, serta kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Aysan et al., 2023; Pambudi & Kusumanto, 2023; Pambudi, 2024; Bangsawan, 2025). Selain itu, sebagian besar penelitian juga menegaskan bahwa permasalahan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek politik, kelembagaan, dan hubungan antaraktor dalam proses kebijakan (Trihatmoko, 2024; Karso, 2025).

Meskipun memiliki kesamaan fokus pada pengelolaan lingkungan hidup, penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dalam aspek objek kajian, ruang lingkup penelitian, dan pendekatan analisis yang digunakan. Sebagian penelitian berfokus pada tata kelola sumber daya alam dan konflik lingkungan pada level nasional maupun internasional (Aysan et al., 2023; Noor et al., 2025), sementara penelitian lainnya lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan lingkungan, kapasitas kelembagaan, dan pembangunan berkelanjutan (Hidayat, 2024; Ines et al., 2025; Bangsawan, 2025). Dari sisi pendekatan, sebagian besar penelitian menggunakan analisis implementasi kebijakan dan tata kelola lingkungan, sedangkan kajian yang secara khusus menggunakan perspektif evaluasi kebijakan publik masih relatif terbatas.

Di samping itu, penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian dilakukan pada tingkat nasional, sektoral, atau regional sehingga belum banyak menjelaskan dinamika implementasi kebijakan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten yang menghadapi tekanan industrialisasi secara langsung. Kedua, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek implementasi kebijakan, tata kelola sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga evaluasi kebijakan lingkungan hidup menggunakan indikator evaluasi kebijakan publik secara komprehensif masih relatif terbatas. Ketiga, keterkaitan antara dinamika politik daerah, kepentingan industrialisasi, dan efektivitas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan persamaan, perbedaan, dan keterbatasan penelitian terdahulu tersebut, posisi penelitian ini adalah melengkapi sekaligus mengembangkan kajian yang telah ada melalui evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi kebijakan, tetapi juga menganalisis pengaruh dinamika politik daerah, tekanan industrialisasi, dan kapasitas kelembagaan terhadap efektivitas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian yang masih terdapat dalam kajian evaluasi kebijakan lingkungan hidup pada daerah industri.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian terdahulu, tidak hanya dari aspek objek penelitian, tetapi juga dari kontribusi konseptual dan empiris yang dihasilkan dalam kajian evaluasi kebijakan lingkungan hidup. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tata kelola sumber daya alam, implementasi kebijakan lingkungan, keberlanjutan pembangunan, atau kapasitas kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagian besar penelitian tersebut menempatkan faktor kelembagaan, regulasi, dan tata kelola sebagai variabel yang berdiri sendiri dalam menjelaskan keberhasilan kebijakan lingkungan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan dimensi politik daerah, tekanan industrialisasi, dan kapasitas kelembagaan ke dalam evaluasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan kerangka William N. Dunn. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan hidup pada daerah industri tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi dan implementasi kebijakan, tetapi juga oleh interaksi antara kepentingan ekonomi, dinamika politik daerah, kapasitas pengawasan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Secara empiris, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tekanan industrialisasi yang tinggi tidak hanya memengaruhi satu aspek kebijakan, tetapi berdampak secara simultan terhadap seluruh dimensi evaluasi kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan hidup tidak dapat dievaluasi secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai keterkaitan antardimensi evaluasi yang dipengaruhi oleh konteks pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai penerapan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn pada sektor lingkungan hidup, khususnya pada daerah yang menghadapi tekanan industrialisasi dan investasi yang tinggi.

Kontribusi ilmiah lain dari penelitian ini adalah penguatan perspektif bahwa evaluasi kebijakan lingkungan hidup pada tingkat daerah perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai satu kesatuan analisis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi orientasi ekonomi dan investasi berpotensi menurunkan kualitas implementasi kebijakan lingkungan meskipun regulasi yang tersedia telah memadai. Hasil penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat berperan sebagai faktor penghubung yang menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan hidup dalam menghadapi tekanan pembangunan.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi kebijakan lingkungan hidup dengan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara dinamika politik daerah, industrialisasi, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas kebijakan lingkungan hidup. Kontribusi tersebut memperluas penggunaan kerangka evaluasi William N. Dunn dari sekadar alat penilaian kebijakan menjadi instrumen untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan lingkungan hidup pada daerah industri.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses kebijakan, dinamika kelembagaan, serta berbagai fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan lingkungan hidup di daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas kebijakan secara komprehensif melalui perspektif para aktor yang terlibat secara langsung dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada pengukuran kuantitatif semata (Creswell & Creswell, 2023). Selain itu, penelitian kebijakan publik

memerlukan pemahaman yang tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga pada proses, konteks, serta interaksi antaraktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan (Akbar, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tujuh informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan, kewenangan, dan pemahaman terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Komposisi informan terdiri atas dua orang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, satu orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang yang berperan dalam fungsi legislasi dan pengawasan kebijakan daerah, satu orang pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang terlibat dalam pengelolaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan, dua orang masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak aktivitas industri, serta satu orang petani yang terdampak langsung oleh perubahan fungsi lahan dan kondisi lingkungan hidup.

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa masing-masing informan mewakili aktor-aktor kunci yang terlibat maupun terdampak dalam proses kebijakan lingkungan hidup. Unsur Dinas Lingkungan Hidup dipilih untuk memperoleh informasi mengenai implementasi dan pengawasan kebijakan, DPRD dipilih untuk memahami aspek politik dan fungsi pengawasan kebijakan daerah, sedangkan PUPR dipilih karena memiliki keterkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan. Sementara itu, masyarakat dan petani dipilih untuk memperoleh perspektif kelompok penerima dampak kebijakan sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari sisi pemerintah maupun masyarakat.

Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, DPRD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), masyarakat, dan petani. Informasi yang diperoleh dari masing-masing informan dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Melalui proses tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi implementasi kebijakan dari berbagai perspektif pemangku kepentingan.

Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara mengenai efektivitas pengawasan lingkungan, koordinasi antarinstansi, maupun dampak kebijakan terhadap masyarakat diverifikasi melalui hasil observasi lapangan pada kawasan yang terdampak aktivitas industri serta melalui dokumen resmi seperti laporan Dinas Lingkungan Hidup, dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), data penggunaan lahan, laporan pengawasan lingkungan, dan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila ditemukan kesesuaian informasi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka data tersebut dinilai memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Selain itu, dilakukan *member check* kepada informan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi peneliti untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Dengan demikian, proses triangulasi tidak hanya berfungsi untuk memverifikasi kebenaran data, tetapi juga untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan keabsahan temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan. Untuk memperkuat proses analisis, peneliti memanfaatkan aplikasi NVivo 12 dalam pengorganisasian dan pengolahan data kualitatif. Tahap awal dilakukan dengan mentranskripsikan seluruh hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen penelitian ke dalam format digital yang kemudian diimpor ke dalam NVivo 12. Selanjutnya dilakukan proses *open coding* dengan mengidentifikasi kata kunci, pernyataan penting, dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil *coding* tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori atau *nodes* berdasarkan kesamaan makna dan keterkaitannya dengan tema penelitian.

Pada tahap berikutnya dilakukan proses kategorisasi dan *node analysis* untuk mengidentifikasi hubungan antarkategori serta pola-pola yang muncul dari data. Kategori yang terbentuk kemudian disesuaikan dengan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Melalui fitur *node hierarchy*, *word frequency*, dan *coding query* pada NVivo 12, peneliti melakukan penelusuran terhadap tema-tema dominan yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi hasil analisis dengan menghubungkan temuan-temuan yang diperoleh dari setiap *node* dengan kerangka teori evaluasi kebijakan William N. Dunn. Interpretasi dilakukan secara komparatif antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menemukan kesesuaian maupun perbedaan informasi yang diperoleh. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjelaskan tingkat keberhasilan kebijakan berdasarkan masing-masing indikator evaluasi sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode penelitian tahun 2025 sampai dengan 2026 yang mencakup kegiatan pengumpulan data lapangan, wawancara, dokumentasi, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian. Dengan lokasi dan periode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan kondisi aktual implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan mampu menjawab berbagai permasalahan lingkungan yang muncul sebagai konsekuensi dari pesatnya perkembangan industri dan pembangunan daerah. Analisis dilakukan menggunakan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam dimensi tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang telah memberikan kontribusi dalam pengendalian berbagai permasalahan lingkungan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta kuatnya tekanan

pembangunan dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, pembahasan berikut difokuskan pada analisis setiap dimensi evaluasi kebijakan untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang secara lebih mendalam.

3.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang dianalisis berdasarkan kemampuan kebijakan dalam mengendalikan pencemaran lingkungan, menekan laju alih fungsi lahan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam di tengah pesatnya perkembangan kawasan industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi dan program pengawasan lingkungan, kondisi empiris menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan masih terus terjadi dan cenderung meningkat.

Tabel 1.
Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

Tahun	Lahan Sawah (Ha)	Alih Fungsi Lahan (Ha)	Kasus Lingkungan
2018	95.000	1.200	37
2020	92.500	1.900	52
2022	89.600	2.300	61
2023	88.400	2.800	74

Sumber: PUPR Kabupaten Karawang, DLH Kabupaten Karawang, dan RPPLH Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Tabel 1., terlihat bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari 95.000 hektare pada tahun 2018 menjadi 88.400 hektare pada tahun 2023. Pada periode yang sama, alih fungsi lahan meningkat dari 1.200 hektare menjadi 2.800 hektare, sementara jumlah kasus lingkungan meningkat dari 37 kasus menjadi 74 kasus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai instrumen kebijakan yang telah diterapkan belum mampu mengendalikan tekanan pembangunan terhadap lingkungan hidup secara efektif. Tingginya laju industrialisasi dan kebutuhan investasi daerah menjadi faktor yang mendorong terjadinya perubahan pemanfaatan ruang dan meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pengawasan lingkungan telah dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil observasi lapangan yang menunjukkan masih adanya aktivitas industri di beberapa kawasan yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup. Selain itu, hasil dokumentasi berupa laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dan data kasus lingkungan menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran lingkungan masih mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengendalikan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi.

Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan belum dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi efektivitas belum terpenuhi secara optimal. Kebijakan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang telah memberikan kontribusi dalam upaya pengendalian lingkungan, namun belum mampu menekan peningkatan kasus lingkungan maupun laju alih fungsi lahan secara signifikan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengendalian pembangunan yang lebih berorientasi pada prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif William N. Dunn, efektivitas diukur berdasarkan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan berbagai regulasi dan program pengawasan lingkungan, peningkatan jumlah kasus lingkungan dan terus berkurangnya luas lahan pertanian produktif mengindikasikan bahwa tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan perlindungan lingkungan hidup dengan hasil yang dicapai di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan masih tergolong rendah karena output kebijakan yang dihasilkan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengendalian permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

3.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang, dimensi efisiensi dianalisis berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran, sarana pendukung, serta koordinasi kelembagaan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup secara efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menyebabkan efisiensi kebijakan belum tercapai secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan lingkungan. Jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya aktivitas industri yang harus diawasi. Kondisi tersebut menyebabkan intensitas pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal terhadap seluruh potensi pelanggaran lingkungan yang terjadi.

Di sisi lain, kebutuhan akan pengawasan lingkungan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kawasan industri dan aktivitas pembangunan di Kabupaten Karawang. Selain keterbatasan sumber daya manusia, aspek anggaran juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup. Ketersediaan anggaran yang terbatas berdampak pada pelaksanaan berbagai program pengawasan, pemantauan kualitas lingkungan, serta kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan lingkungan. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa luas wilayah pengawasan serta tingginya aktivitas industri memerlukan intensitas pengawasan yang tinggi. Temuan tersebut didukung oleh dokumentasi kelembagaan dan laporan kinerja perangkat daerah yang menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya pengawas dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan yang harus ditangani. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan lingkungan belum dapat dilakukan secara optimal.

Keterbatasan tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan prioritas terhadap program-program tertentu sehingga tidak seluruh kebutuhan pengelolaan lingkungan dapat

dilaksanakan secara optimal. Akibatnya, efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia belum mampu menghasilkan capaian kebijakan yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan efisiensi melalui koordinasi antarinstansi dan pemanfaatan berbagai instrumen pengawasan yang tersedia. Namun demikian, koordinasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis yang menyebabkan proses pengambilan keputusan maupun tindak lanjut terhadap permasalahan lingkungan belum selalu berjalan secara cepat dan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengoordinasikan sumber daya tersebut secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi efisiensi dalam kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang belum terpenuhi secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan menjadi faktor utama yang memengaruhi tingkat efisiensi pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi alokasi sumber daya agar pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dapat berjalan lebih efisien dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dunn, efisiensi berkaitan dengan kemampuan mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pengawasan menunjukkan bahwa biaya dan sumber daya yang dikeluarkan belum menghasilkan capaian kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan kata lain, hubungan antara input dan output kebijakan belum berjalan secara optimal sehingga tingkat efisiensi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang masih perlu ditingkatkan.

3.3 Kecukupan

Kecukupan merupakan dimensi evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya. Dalam penelitian ini, dimensi kecukupan dianalisis berdasarkan kemampuan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Karawang, khususnya pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, serta dampak negatif aktivitas industri terhadap keberlanjutan sumber daya alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan mampu memberikan dasar hukum dan arah pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, namun belum sepenuhnya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan yang berkembang di lapangan.

Berbagai regulasi dan program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Namun demikian, berbagai fenomena empiris masih menunjukkan adanya peningkatan kasus lingkungan, berkurangnya lahan pertanian produktif, serta munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait kualitas lingkungan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan yang muncul akibat pesatnya perkembangan kawasan industri dan pembangunan daerah. Dengan kata lain, keberadaan kebijakan telah memberikan kontribusi terhadap upaya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi tingkat kecukupannya masih belum mampu mengatasi akar permasalahan secara menyeluruh.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kecukupan kebijakan adalah masih terbatasnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program lingkungan hidup. Meskipun masing-masing perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, pelaksanaan kebijakan sering kali memerlukan sinergi yang lebih kuat agar berbagai program yang dijalankan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan yang sama.

Selain itu, kompleksitas permasalahan lingkungan yang melibatkan berbagai sektor juga memerlukan pendekatan yang lebih terpadu agar kebijakan yang diterapkan mampu memberikan dampak yang lebih signifikan. Di sisi lain, peningkatan aktivitas industri yang terus berlangsung menciptakan tantangan baru yang tidak selalu dapat diantisipasi secara cepat oleh kebijakan yang ada. Hal tersebut menyebabkan beberapa permasalahan lingkungan berkembang lebih cepat dibandingkan kemampuan kebijakan dalam mengatasinya. Akibatnya, berbagai program pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan kondisi lingkungan yang sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan.

Selain diperoleh melalui wawancara, temuan mengenai belum optimalnya penyelesaian permasalahan lingkungan juga diperkuat oleh hasil dokumentasi berupa data kasus lingkungan dan dokumen perencanaan daerah yang menunjukkan masih adanya peningkatan tekanan terhadap lingkungan hidup. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa wilayah masih menghadapi persoalan alih fungsi lahan dan aktivitas pembangunan yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi kecukupan belum terpenuhi secara optimal. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang telah mampu memberikan kerangka pengaturan dan mekanisme pengelolaan lingkungan hidup, namun belum sepenuhnya cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang muncul akibat tekanan industrialisasi dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan integrasi program, serta penyempurnaan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan permasalahan lingkungan agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat tercapai secara lebih optimal.

Dalam kerangka evaluasi Dunn, kecukupan mengacu pada kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan atau mengurangi tingkat permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan program lingkungan hidup memang telah memberikan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan, namun belum mampu mengatasi secara menyeluruh berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan, alih fungsi lahan, dan dampak industrialisasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecukupan kebijakan masih terbatas karena solusi yang diberikan belum sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

3.4 Pemerataan

Pemerataan merupakan dimensi evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana manfaat dan dampak kebijakan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, dimensi pemerataan dianalisis berdasarkan distribusi manfaat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap berbagai pihak, baik pemerintah, pelaku industri, masyarakat, maupun kelompok yang terdampak langsung oleh perubahan lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan manfaat yang dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Perkembangan industri yang pesat di Kabupaten Karawang telah memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta perluasan kesempatan kerja. Namun demikian, manfaat pembangunan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kualitas lingkungan hidup yang dirasakan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan industri dan wilayah yang mengalami alih fungsi lahan, masih merasakan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, berkurangnya lahan pertanian produktif, serta meningkatnya risiko pencemaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan belum terdistribusi secara seimbang di antara seluruh kelompok masyarakat.

Hasil wawancara dengan informan juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya kebijakan lingkungan hidup sering kali dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Pada beberapa kondisi, kepentingan investasi dan pengembangan kawasan industri memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan upaya perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Hasil observasi menunjukkan bahwa wilayah yang berada di sekitar kawasan industri cenderung menghadapi tekanan lingkungan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Temuan tersebut sejalan dengan dokumentasi penggunaan lahan dan data lingkungan yang menunjukkan adanya perbedaan dampak pembangunan antarwilayah

Akibatnya, sebagian masyarakat menilai bahwa manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama oleh kelompok yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam dan lahan pertanian. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam berbagai program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga belum sepenuhnya merata. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan, tingkat partisipasi dan akses terhadap informasi masih berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Kondisi ini berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat yang setara dari pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi pemerataan belum terpenuhi secara optimal. Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang telah memberikan manfaat bagi pembangunan daerah, namun distribusi manfaat dan dampaknya masih belum dirasakan secara seimbang oleh seluruh kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang terdampak langsung oleh aktivitas pembangunan dan industrialisasi.

Menurut Dunn, pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada kelompok sasaran secara adil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi lebih banyak dirasakan melalui peningkatan investasi dan kesempatan kerja, sedangkan sebagian masyarakat di sekitar kawasan industri masih menanggung dampak lingkungan yang cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan dampak kebijakan belum berlangsung secara seimbang sehingga indikator pemerataan belum terpenuhi secara optimal.

3.5 Responsivitas

Responsivitas merupakan dimensi evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan mampu merespons kebutuhan, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Dalam penelitian ini, dimensi responsivitas dianalisis

berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerima, menindaklanjuti, serta mengakomodasi berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya merespons berbagai permasalahan lingkungan melalui penyusunan regulasi, pelaksanaan pengawasan, serta penanganan berbagai laporan masyarakat. Namun demikian, tingkat responsivitas kebijakan masih belum berjalan secara optimal.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki perhatian yang cukup besar terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, perubahan fungsi lahan, dan dampak aktivitas industri. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan maupun evaluasi kebijakan lingkungan hidup masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. Di sisi lain, keterbatasan akses informasi mengenai kebijakan lingkungan hidup juga memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Temuan wawancara tersebut diperkuat oleh hasil dokumentasi pengaduan masyarakat dan laporan penanganan kasus lingkungan yang menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan telah tersedia, namun tindak lanjut terhadap beberapa laporan masih memerlukan waktu yang relatif panjang.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat telah tersedia, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kecepatan tindak lanjut, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan yang dilaporkan. Dalam beberapa kasus, masyarakat menilai bahwa penyelesaian permasalahan lingkungan membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan persepsi bahwa respons pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme pengaduan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam memberikan tindak lanjut yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Selain itu, pesatnya perkembangan industri dan pembangunan di Kabupaten Karawang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merespons berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Apabila respons terhadap permasalahan lingkungan tidak dilakukan secara cepat dan tepat, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan berpotensi menurun. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi responsivitas belum terpenuhi secara optimal.

Pemerintah daerah telah menunjukkan upaya dalam merespons berbagai permasalahan lingkungan hidup, namun tingkat partisipasi masyarakat yang masih terbatas serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat menunjukkan bahwa responsivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik, peningkatan transparansi informasi, serta percepatan tindak lanjut terhadap berbagai permasalahan lingkungan agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Responsivitas dalam evaluasi Dunn menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengenali, merespons, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Meskipun

pemerintah daerah telah menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan permasalahan lingkungan, keterbatasan tindak lanjut terhadap beberapa aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat belum seluruhnya terakomodasi secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat responsivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih sesuai dengan harapan masyarakat.

3.6 Ketepatan

Ketepatan merupakan dimensi evaluasi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan benar-benar mampu menjawab permasalahan yang menjadi dasar pembentukannya dan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, dimensi ketepatan dianalisis berdasarkan kesesuaian kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, serta tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karawang sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan pada dasarnya telah memiliki tujuan yang tepat, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan ketepatan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Secara normatif, kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah dirancang untuk mengendalikan pencemaran, melindungi sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan tersebut juga telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan masih terus terjadi, seperti meningkatnya kasus pelanggaran lingkungan dan berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kebijakan yang telah dirumuskan belum sepenuhnya tercermin dalam hasil yang dicapai di lapangan.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi ketepatan kebijakan adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara upaya perlindungan lingkungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan investasi daerah. Sebagai daerah yang menjadi pusat aktivitas industri dan investasi, Kabupaten Karawang menghadapi tekanan pembangunan yang cukup tinggi.

Dalam beberapa kondisi, kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan industri memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan aspek perlindungan lingkungan. Akibatnya, implementasi kebijakan lingkungan hidup belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai dampak yang muncul akibat aktivitas pembangunan tersebut.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa perkembangan kawasan industri masih berlangsung secara intensif pada beberapa wilayah. Sementara itu, dokumentasi berupa data alih fungsi lahan dan laporan lingkungan hidup menunjukkan bahwa tekanan pembangunan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, kompleksitas permasalahan lingkungan yang terus berkembang juga menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa permasalahan yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang diterapkan masih perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat yang terdampak secara langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibentuk, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan dinamika permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi ketepatan belum terpenuhi secara optimal. Meskipun kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang telah dirancang untuk menjawab berbagai permasalahan lingkungan yang ada, implementasinya masih dipengaruhi oleh dominasi kepentingan ekonomi, tekanan industrialisasi, serta kompleksitas permasalahan lingkungan yang terus berkembang.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari proses pembangunan, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak hanya tepat secara normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi yang efektif terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Dalam perspektif Dunn, ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Secara normatif, kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang telah dirancang untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan akibat pembangunan dan industrialisasi. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai permasalahan lingkungan masih terus terjadi sehingga manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok sasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan telah sesuai, implementasinya belum sepenuhnya mampu menghasilkan solusi yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang berkembang di daerah.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal berdasarkan enam dimensi evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki regulasi dan instrumen kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan hidup, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Meningkatnya kasus lingkungan, berkurangnya luas lahan pertanian produktif, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan masih menghadapi tantangan dalam menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan di Kabupaten Karawang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Aysan et al., 2023; Pambudi & Kusumanto, 2023). Dalam konteks Kabupaten Karawang, tekanan industrialisasi yang tinggi menyebabkan kebijakan lingkungan hidup dihadapkan pada situasi yang kompleks, di mana pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pemerataan, responsivitas, dan ketepatan masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, distribusi manfaat pembangunan, serta dominasi kepentingan ekonomi dalam proses kebijakan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan yang baik tidak hanya harus mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, menciptakan keadilan, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan (Akbar, 2023). Dalam penelitian ini, perlindungan lingkungan hidup masih menghadapi tantangan berupa kuatnya tekanan pembangunan dan kebutuhan investasi yang sering kali menempatkan aspek lingkungan pada posisi yang kurang prioritas dibandingkan kepentingan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara aspek lingkungan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan pengawasan, memperluas partisipasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap proses pembangunan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan (Khairi, 2014; Suwanda et al., 2024). Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang bukan terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif, adil, responsif, dan tepat sasaran dalam menghadapi tekanan industrialisasi yang terus berkembang.

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi kebijakan William N. Dunn. Selama ini enam dimensi evaluasi kebijakan yang terdiri atas efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan umumnya digunakan sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keenam dimensi tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang sama, yaitu tekanan industrialisasi, dinamika politik daerah, kapasitas kelembagaan, dan orientasi pembangunan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa evaluasi kebijakan lingkungan hidup tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian kebijakan, tetapi juga untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pada daerah dengan tingkat industrialisasi yang tinggi, efektivitas kebijakan lingkungan hidup tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas regulasi yang dimiliki pemerintah daerah. Keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup. Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas penerapan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan menunjukkan bahwa konteks politik dan ekonomi daerah merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses evaluasi kebijakan, khususnya pada sektor lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi teoritis bahwa penggunaan kerangka evaluasi William N. Dunn dalam kajian lingkungan hidup perlu dipadukan dengan analisis terhadap faktor kelembagaan, politik, dan pembangunan daerah agar mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada pengukuran hasil kebijakan, tetapi juga pada identifikasi hubungan antara konteks kebijakan dan capaian kebijakan yang dihasilkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat belum terlaksana secara optimal berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi dan program perlindungan lingkungan hidup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan tekanan industrialisasi, keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan kebijakan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola hubungan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kapasitas kelembagaan, dan perlindungan lingkungan hidup secara seimbang.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas pada pihak-pihak yang dianggap memahami pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, sehingga temuan penelitian sangat bergantung pada informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Penelitian ini juga dibatasi pada penggunaan kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sehingga masih terdapat berbagai aspek lain di luar penelitian, seperti pengaruh kondisi ekonomi makro, dinamika politik yang lebih luas, kapasitas fiskal daerah, serta perkembangan investasi industri yang kemungkinan turut memengaruhi keberhasilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai evaluasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cakupan wilayah yang lebih luas, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun perbandingan antar daerah yang memiliki karakteristik pembangunan dan industrialisasi yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan yang lebih beragam, baik kuantitatif, *mixed methods*, maupun evaluasi kebijakan berbasis dampak (*impact evaluation*), sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan lingkungan hidup. Penambahan variabel seperti kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, kualitas tata kelola pemerintahan, investasi industri, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat juga diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan lingkungan hidup. Di samping itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis strategi penguatan pengawasan lingkungan, peningkatan partisipasi publik, serta pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan daerah guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang beserta seluruh jajaran instansi terkait yang telah memberikan izin, data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan penelitian, serta kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi sehingga penelitian mengenai evaluasi kebijakan politik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, B. (2023). *Governance, Accountability And Public Sector Performance In Indonesia*. Routledge.

Aysan, A. F., Bakkar, Y., Ul-Durar, S., & Kayani, U. N. (2023). Natural Resources Governance And Conflicts: Retrospective Analysis. *Resources Policy, 85*, 103942. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103942

Bangsawan, T. A., Arasid, M. I., Laksana, A., Amilia, R., Wahyiah, I. R., Saepudin, E. A., Rahayu, L. F., Handayani, P., & Arifin, S. (2025). Indonesia's Environmental Policy In The Dynamics Of Global Political Economy. *Kne Social Sciences, 10*(32), 122–130. https://doi.org/10.18502/kss.v10i32.20460

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (6th Ed.). SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th Edition). Routledge.

Hidayat, S. K. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 15(2), 112–126. https://doi.org/10.61132/manuhara.v2i2.723

Ines, A., Ramadhan, M., & Putri, A. (2025). Peran Kebijakan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Keberlanjutan Ekosistem. Environmental Policy Review, 18(1), 55–72. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6861

Karso, A. J. (2025). Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia. Frontiers in Political Science, 7, 1601480. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480

Khairi, H. (2014). *Manajemen Strategis Pemerintahan Daerah*. Jatinangor: Ipdn Press.

Khairi, H. (2021). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Jatinangor: Ipdn Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th Ed.). Sage Publications.

Noor, F., Kosandi, M., Rahman, A. R., Yustiningrum, R. R. E., & Nasution, A. M. (2025). Natural Resources Governance In Indonesia From A Political Perspective: The Marine, Fisheries, And Forestry Cases. In *Natural Resources Governance In Indonesia*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-96-6913-4_3

Pambudi, A. S. (2024). *Water Resources Governance In Indonesia Towards Environmental Sustainability Along With Social And Economis Development*. Environmental Governance In Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/368224380

Pambudi, A. S. (2025). Revitalization Of Sustainable Water Resources Policy In The Decentralization Era. *Pusat Jurnal Lingkungan Dan Energi Lestari*. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5743036

Pambudi, A. S., & Kusumanto, T. (2023). Water Resources Governance In Indonesia Towards Environmental Sustainability Along With Social And Economic Development. In *Environmental Governance In Indonesia*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-15904-6_16

Ridwan, I., & Baso, A. (2017). *Pembangunan Daerah Dan Tata Kelola Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.

Siraj, A., & Budhiartie, A. (2025). Natural Resource Governance In Indonesia And Pakistan: A Comparative Review. *Indonesian Comparative Law Review*, *7*(2), 88–101. https://doi.org/10.18196/iclr.v7i2.25037

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyawati, A. I., & Nugroho, A. H. D. (2024). Policy Diffusion Of Environmental Performance: Economic And Institutional Determinants In Emerging Markets. *Advances In Environmental Innovation*, 1(2), 143–153. https://doi.org/10.69725/aneva.v1i2.201

Suwanda, D., Akbar, B., & Nugraha, A. (2024). *Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IPDN Press.

Syarifuddin, S., Zhee, L. Y., Dzakiy, U. N., Kalaloi, A. F., & Pradana, M. (2025). Environmental, Social, And Governance (ESG) In Indonesia: Analyzing Sustainability Reports. *Journal Of Infrastructure, Policy And Development*. https://www.researchgate.net/publication/399838390

Trihatmoko, R. A., & Susilo, Y. S. (2024). Natural resource governance and strategic economic resources: The perspective of Indonesia Raya Incorporated. Humanities and Social Sciences Communications, 11, 395. https://doi.org/10.1057/s41599-024-02772-5